

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Teori Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menerangkan relasi kontraktual antara prinsipal selaku pemilik entitas serta agen selaku pengelola yang diberi wewenang untuk menjalankan operasional entitas. Teori keagenan pertama kali dikemukakan secara formal oleh Ross pada tahun 1973, kemudian dikembangkan secara luas oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) mengembangkan teori ini dengan mengintegrasikan teori keagenan, teori hak kepemilikan, serta teori keuangan untuk menjelaskan struktur kepemilikan entitas, di mana prinsipal mendelegasikan sebagian wewenang penetapan kebijakan kepada agen.

Hermawan (2022) menguraikan bahwa *agency theory* ialah sebuah teori yang menerangkan mengenai adanya keterkaitan antara agen selaku pelaksana perusahaan yang mendapatkan wewenang dari pemegang saham (prinsipal) untuk mencapai tujuan perusahaan, dimana tujuan perusahaan tentunya mengarah pada kepentingan pemegang saham. Monica dan Ismanto (2025) juga menegaskan bahwa pada dasarnya *agency theory* merupakan sebuah konsep penghubung di mana perusahaan sebagai organisasi dikendalikan oleh direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham sesuai dengan hasil kinerja dan pengawasan dari dewan komisaris.

Dalam praktiknya, agen dan prinsipal seringkali berada pada jalur yang tidak sejalan karena agen bergerak sesuai dengan kepentingan diri sendiri dan mengesampingkan kepentingan *shareholders*. Keadaan inilah yang mengakibatkan *agency problem*, di mana manajer cenderung berusaha untuk menghindari pajak demi mencapai kinerja perusahaan yang tinggi sehingga memberikan keuntungan untuk pribadi manajer karena dianggap mencapai target untuk perusahaan (Dewi & Dewi, 2025). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan biaya keagenan (*agency costs*) sebagai penjumlahan dari tiga komponen, yakni biaya pemantauan oleh prinsipal, biaya pengikatan oleh agen, sekaligus kerugian residual yang diakibatkan keputusan manajer yang tidak optimal bagi prinsipal. Adanya *agency problem* ini tentunya juga membuat manajer menentukan berbagai cara agar beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi lebih efisien (Azis et al., 2025).

Konflik keagenan secara langsung memengaruhi profitabilitas perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa dengan tingginya utang, manajer berada di bawah tekanan untuk berinvestasi pada berbagai proyek yang menyediakan keuntungan agar menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayarkan utang (Jensen, 1986). Namun ketika manajer lebih mengutamakan penghindaran pajak dibanding penciptaan nilai, keputusan investasi yang diambil cenderung sub optimal sehingga profitabilitas tidak mencerminkan potensi riil perusahaan.

Cara yang sering dilakukan oleh manajer adalah dengan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga seperti perbankan ataupun perusahaan lain sebagai bentuk pendanaan operasional yang menggantikan sebagian peran modal saham. Adanya pinjaman ini akan meningkatkan tingkat *leverage* perusahaan sehingga

beban bunga yang ditanggung semakin naik dan menekan laba perusahaan, yang diharapkan mampu menurunkan beban pajak. Raainaa dan Firmansyah (2025) menguraikan bahwa perubahan skema permodalan pada perusahaan merupakan bentuk strategi perpajakan yang memang diperbolehkan, namun seringkali manajer justru menempuh cara ini sebagai solusi untuk menekan pajak sehingga investor merasa perusahaan tidak mampu menghasilkan kinerja keuangan yang baik, hal inilah yang menjadi sumber konflik antara pemegang saham dan manajer.

Eisenhardt (1989) menegaskan bahwa kontribusi utama teori keagenan terletak pada kemampuannya mengidentifikasi cara mengelola informasi dan risiko dalam operasional perusahaan. Pada kondisi ekonomi yang tidak menentu, manajer yang bersifat *risk-averse* cenderung mengambil keputusan konservatif, termasuk meningkatkan penggunaan utang untuk menekan beban pajak sebagai respons terhadap tekanan kinerja jangka pendek.

Peran manajer dalam melakukan penghindaran pajak melalui pengambilan keputusan terkait penentuan tingkat laba serta pengelolaan rasio utang terhadap total modal perusahaan merupakan wujud nyata dari *agency problem*. Teori keagenan menyatakan bahwa manajer mungkin memprioritaskan kepentingan pribadi mereka seperti memperoleh bonus yang terkait dengan kinerja keuangan jangka pendek di atas tujuan jangka panjang yang seharusnya menguntungkan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Penghindaran pajak yang dilakukan manajer seolah menampilkan kinerja yang baik dalam jangka pendek karena laba bersih tampak lebih tinggi setelah beban pajak ditekan, namun tidak mencerminkan penciptaan nilai yang sesungguhnya bagi pemegang saham.

Berlandaskan pada uraian di atas, bisa dikatakan bahwa *tax avoidance* sebagai bentuk ketidaksesuaian visi antara manajer dengan *shareholder*, di mana manajer lebih mengambil sikap efisiensi pada biaya perusahaan untuk menekan pajak sedangkan pemegang saham menginginkan laba perusahaan yang optimal. Profitabilitas yang tinggi menghasilkan arus kas bebas yang justru menyediakan peluang bagi manajer agar melaksanakan penghindaran pajak, *leverage* digunakan sebagai instrumen penekan pajak yang memunculkan konflik baru antara pemegang saham dan kreditor, sementara ketidakpastian ekonomi memperlebar asimetri informasi sehingga memperkuat motivasi manajer dalam menetapkan kebijakan pajak yang tidak selalu selaras dengan kepentingan prinsipal.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul	Nama (tahun)	Variabel	Tujuan	Hasil
The Influence of Profitability, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , and <i>Tax Haven</i> on <i>Tax Avoidance</i> in Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023	Wijayanti dan Wafiroh (2025)	Variabel independen: profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> , dan <i>tax haven</i> . Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> .	Menganalisis pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> , dan <i>tax haven</i> terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2023.	Profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Tax haven</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan,

Judul	Nama (tahun)	Variabel	Tujuan	Hasil
				seluruh variabel tidak menimbulkan dampak pada <i>tax avoidance</i> .
<i>Access to Finance and Corporate Tax Avoidance: International Evidence</i>	Benkraiem <i>et al.</i> (2025)	Variabel independen: akses pembiayaan dan <i>financial constraints</i> . Variabel dependen: <i>corporate tax avoidance</i> . Variabel konteks: <i>economic policy uncertainty</i> , utang pemerintah, dan perlindungan investor.	Menguji hubungan antara akses pembiayaan dan <i>corporate tax avoidance</i> menggunakan 63.443 observasi perusahaan dari 37 negara.	Perusahaan dengan akses pembiayaan terbatas lebih cenderung melakukan <i>tax avoidance</i> . Pengaruh tersebut semakin kuat ketika <i>economic policy uncertainty</i> tinggi, terutama pada negara dengan utang pemerintah tinggi dan perlindungan investor lemah.
Exploring Impact of Profitability, Leverage and Capital Intensity on Avoidance of Tax, Moderated by Size of Firm in LQ45 Companies	Hendayana <i>et al.</i> (2024)	Variabel independen: profitabilitas, <i>leverage</i> , dan <i>capital intensity</i> . Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> . Variabel moderasi: <i>firm size</i> .	Menguji pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan LQ45 di BEI periode 2019 sampai 2022, serta menguji peran <i>firm size</i> sebagai	Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Firm size</i> memperkuat pengaruh profitabilitas dan <i>leverage</i> , tetapi

Judul	Nama (tahun)	Variabel	Tujuan	Hasil
			variabel moderasi.	memperlemah pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i>	Simanjuntak <i>et al.</i> (2024)	Variabel independen: tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan <i>leverage</i> . Variabel dependen: penghindaran pajak.	Mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai 2023.	Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> menimbulkan dampak positif pada penghindaran pajak.
Peran <i>Sales Growth</i> dalam Memoderasi Hubungan antara <i>Leverage</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	Budiadnyani dan Dewi (2024)	Variabel independen: <i>leverage</i> . Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> . Variabel moderasi: <i>sales growth</i> .	Menguji pengaruh <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> serta menguji kemampuan <i>sales growth</i> dalam memoderasi hubungan <i>leverage</i> dan <i>tax avoidance</i> pada perusahaan subsektor <i>food and</i>	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Sales growth</i> memperlemah pengaruh <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .

Judul	Nama (tahun)	Variabel	Tujuan	Hasil
			<i>beverage</i> di BEI.	
Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan	Karlina dan Wirajaya (2024)	Variabel independen: profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan. Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> .	Menguji pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan sektor pertambangan, serta melihat perbedaan rata-rata sebelum dan selama COVID-19.	Profitabilitas dan ukuran perusahaan menimbulkan dampak pada <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak menimbulkan dampak pada <i>tax avoidance</i> . Tidak terdapat perbedaan rata-rata <i>tax avoidance</i> dan profitabilitas sebelum dan selama COVID-19, tetapi terdapat perbedaan rata-rata <i>leverage</i> .
<i>Political Connection and Tax Avoidance: Evidence from Two-Tier Board System in Indonesia</i>	Diningrum dan Kurniawati (2024)	Variabel independen: koneksi politik pada dewan komisaris dan koneksi politik pada direksi. Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> yang diukur dengan <i>book tax difference</i> dan <i>cash effective tax rate</i> .	Menguji pengaruh koneksi politik pada dewan komisaris dan direksi terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2020 sampai 2022.	Koneksi politik pada dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Koneksi politik pada direksi tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Judul	Nama (tahun)	Variabel	Tujuan	Hasil
<i>Economic Policy Uncertainty and Tax Avoidance: International Evidence</i>	Athira dan Ramesh (2024)	Variabel independen: <i>economic policy uncertainty</i> . Variabel dependen: <i>corporate tax avoidance</i> . Variabel moderasi atau pembeda: karakteristik tata kelola dan institusional negara.	Menguji pengaruh <i>economic policy uncertainty</i> terhadap <i>corporate tax avoidance</i> menggunakan perusahaan terbuka dari 22 negara periode 1999 sampai 2019.	Peningkatan <i>economic policy uncertainty</i> secara umum menurunkan <i>tax avoidance</i> . Namun, hubungan positif muncul pada negara berkembang, negara dengan PDB per kapita rendah, dan negara dengan kualitas tata kelola lebih rendah.
<i>Political Connection Types and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Malaysia</i>	Tee et al. (2022)	Variabel independen: jenis koneksi politik perusahaan. Variabel dependen: <i>corporate tax avoidance</i> . Variabel moderasi: kepemilikan saham CEO dan kepemilikan institusional.	Menguji pengaruh perbedaan jenis koneksi politik terhadap <i>corporate tax avoidance</i> serta peran kepemilikan saham CEO dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi di Malaysia.	Perusahaan berkoneksi politik memiliki kecenderungan <i>corporate tax avoidance</i> yang lebih tinggi. Hasil tersebut terutama terlihat pada perusahaan berkoneksi politik lama dan perusahaan terkait pemerintah.
<i>The Impact of Political Connections on Corporate Tax Burden:</i>	Wang dan You (2022)	Variabel independen: koneksi politik. Variabel	Menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap	Koneksi politik yang lebih kuat menurunkan tingkat pajak perusahaan.

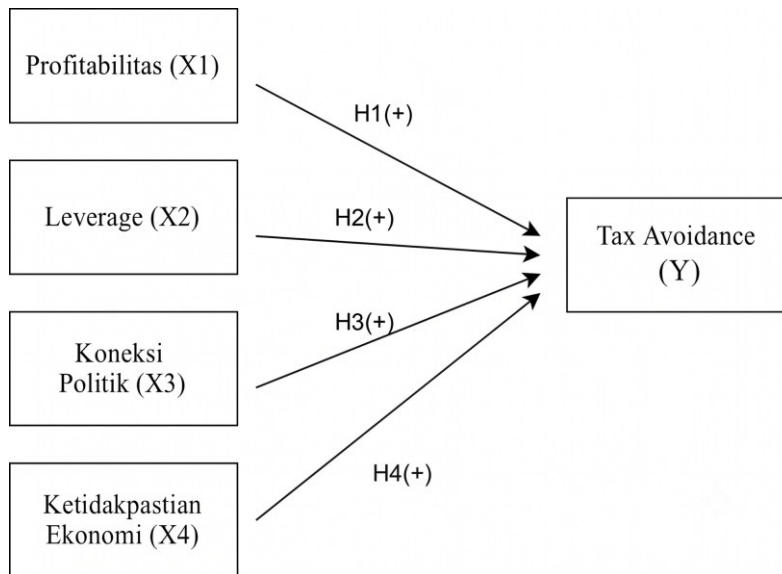
Judul	Nama (tahun)	Variabel	Tujuan	Hasil
Evidence from the Chinese Market		dependen: beban pajak perusahaan atau <i>corporate tax burden</i> .	beban pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di pasar modal China.	Pengaruh penurunan pajak lebih besar pada perusahaan non-BUMN dibandingkan perusahaan BUMN.
<i>Collusion, Political Connection, and Tax Avoidance in China</i>	Tsai <i>et al.</i> (2021)	Variabel independen: kolusi dan koneksi politik. Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> .	Menguji hubungan antara kolusi, koneksi politik, dan <i>tax avoidance</i> pada perusahaan di China.	Koneksi politik berkaitan dengan praktik <i>tax avoidance</i> melalui mekanisme kolusi antara perusahaan dan pemerintah daerah. Ketika pergantian kepemimpinan mengganggu hubungan kolusif, kecenderungan <i>tax avoidance</i> menurun.
<i>Economic Policy Uncertainty and Corporate Tax Avoidance: Evidence from China</i>	Shen <i>et al.</i> (2021)	Variabel independen: <i>economic policy uncertainty</i> . Variabel dependen: <i>corporate tax avoidance</i> . Variabel moderasi atau karakteristik: <i>state ownership</i> , kualitas	Menguji pengaruh <i>economic policy uncertainty</i> terhadap <i>corporate tax avoidance</i> pada perusahaan terbuka di China.	<i>Economic policy uncertainty</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>corporate tax avoidance</i> . <i>State ownership</i> , kualitas pengendalian internal, dan subsidi

Judul	Nama (tahun)	Variabel	Tujuan	Hasil
		pengendalian internal, subsidi pemerintah, kepemilikan manajerial, dan <i>financial constraint</i> .		pemerintah melemahkan pengaruh negatif tersebut. Kepemilikan manajerial dan <i>financial constraint</i> memperkuat pengaruh negatif tersebut.
Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Mahdiana dan Amin (2020)	Variabel independen: profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dan <i>sales growth</i> . Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> .	Menguji pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dan <i>sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .	Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> tidak menimbulkan dampak signifikan pada <i>tax avoidance</i> .
<i>Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness</i>	Kim dan Zhang (2016)	Variabel independen: <i>corporate political connections</i> . Variabel dependen: <i>tax aggressiveness</i> .	Menguji hubungan antara koneksi politik perusahaan dan agresivitas pajak pada perusahaan di Amerika Serikat.	Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih agresif dalam pajak dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Selain adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, penelitian yang mengaitkan faktor-faktor tersebut dengan kebutuhan praktis dalam mengidentifikasi risiko penghindaran pajak pada sektor infrastruktur juga masih relatif terbatas. Padahal, sektor infrastruktur memiliki karakteristik yang khas, seperti kebutuhan pendanaan yang besar, proyek jangka panjang, serta kompleksitas transaksi yang dapat meningkatkan risiko perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguji hubungan antarvariabel, tetapi juga memberikan dasar informasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses *tax risk assessment* serta pengelolaan risiko perpajakan perusahaan secara lebih efektif, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan, investor, maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Konsep dasar ini menguji keterkaitan antarvariabel independen yaitu Profitabilitas, *Leverage*, Koneksi Politik, dan Ketidakpastian Ekonomi memengaruhi variabel dependennya yaitu Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Selain memiliki relevansi teoritis, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pemangku kepentingan di sektor infrastruktur. Berikut disajikan alur pemanfaatan hasil penelitian dalam praktik identifikasi risiko penghindaran pajak.



Gambar 2.2 Alur Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Identifikasi Risiko Penghindaran Pajak Sektor Infrastruktur

2.3 Hipotesis

2.3.1 Hubungan antara Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak

Profitabilitas menunjukkan mampu atau tidaknya entitas dalam mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset, modal, sekaligus aktivitas operasionalnya. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi akan membuat semakin besar pula laba yang menjadi landasan pengenaan pajak, sehingga profitabilitas sering dikaitkan dengan besarnya beban pajak atau *effective tax rate* perusahaan (Richardson & Lanis, 2007). Kondisi ini dapat memperbesar beban pajak yang wajib dibayarkan entitas, sehingga manajemen memacu agar menerapkan strategi perencanaan pajak agar kewajiban yang harus dibayarkan dapat ditekan secara legal. Dalam literatur perpajakan, upaya perusahaan untuk menekan kewajiban pajak kerap dimaknai melalui konsep *tax avoidance* atau agresivitas pajak, yaitu tindakan entitas dalam mengoptimalkan beban pajak agar lebih rendah (Frank et al., 2009; Lanis & Richardson, 2012).

Dalam perspektif teori keagenan, manajemen sebagai agen mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan operasional dan keuangan entitas, sedangkan pemilik perusahaan bertindak sebagai prinsipal yang mendelegasikan pengelolaan kepada manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi, manajemen dapat memiliki insentif untuk menjaga kinerja keuangan melalui efisiensi biaya, termasuk biaya pajak. Dengan sumber daya yang lebih besar, entitas yang profitabel juga mempunyai kapabilitas yang lebih baik untuk melaksanakan perencanaan pajak, baik melalui pemanfaatan insentif perpajakan maupun celah regulasi yang masih diperbolehkan. Hal ini

sejalan dengan pandangan bahwa praktik penghindaran pajak bisa terpengaruh oleh insentif manajerial dan konflik keagenan dalam perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006).

Temuan studi Andriawan et al. (2024) memperlihatkan bahwa profitabilitas menimbulkan dampak positif pada penghindaran pajak, yang memperlihatkan bahwa entitas dengan tingkat laba lebih tinggi biasanya mempunyai peluang lebih besar untuk menerapkan strategi pengurangan beban pajak. Temuan serupa juga oleh Hendayana et al. (2024) yang memperlihatkan bahwa profitabilitas menimbulkan dampak pada penghindaran pajak pada entitas LQ45 yang *terlisting* di BEI. Berlandaskan pada uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam studi ini ialah:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

2.3.2 Hubungan antara *Leverage* dengan Penghindaran Pajak

Leverage menggambarkan besarnya entitas dalam mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Makin tinggi tingkat *leverage*, makin besar pula kewajiban entitas dalam membayarkan beban bunga. Dalam ketentuan fiskal, beban bunga termasuk komponen biaya yang bisa dikurangkan dari pemasukan bruto, sehingga berpotensi menurunkan PKP serta menimbulkan dampak pada berkurangnya jumlah pajak yang harus dikeluarkan oleh entitas (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Hal ini sejalan dengan konsep *debt*

tax shield, yakni manfaat pajak yang didapatkan karena bunga utang bisa menjadi pengurang pajak.

Dalam perspektif teori keagenan, keputusan penggunaan utang tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan pendanaan, tetapi juga bisa memperlihatkan kebijakan manajemen dalam mengatur beban perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa relasi keagenan timbul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan sekaligus pengendalian entitas, sehingga manajemen sebagai agen mempunyai keleluasaan dalam mengambil keputusan yang dapat memengaruhi kepentingan entitas. Desai dan Dharmapala (2006) menerangkan bahwa keputusan penghindaran pajak berkaitan erat dengan insentif manajerial dan tata kelola perusahaan. Ketika utang menghasilkan beban bunga yang bisa menekan laba kena pajak, manajemen bisa mengoptimalkan keadaan tersebut sebagai bagian dari strategi dalam menekan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, *leverage* berpotensi menjadi salah satu aspek yang berhubungan dengan meningkatnya kecenderungan entitas melaksanakan penghindaran pajak.

Hendayana et al. (2024) menemukan bahwa *leverage* menimbulkan dampak pada penghindaran pajak pada entitas LQ45 yang *terlisting* di BEI periode 2019-2022. Temuan studi memperlihatkan bahwa penggunaan utang dapat dikaitkan dengan strategi perusahaan dalam mengelola beban pajak. Makin tinggi tingkat *leverage*, makin besar pula peluang entitas dalam memperoleh manfaat pengurangan pajak melalui beban bunga. Berlandaskan pada uraian tersebut, hipotesis yang diajukan ialah:

H2: *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

2.3.3 Hubungan antara Koneksi Politik dengan Penghindaran Pajak

Koneksi politik ialah relasi yang dimiliki entitas dengan pihak yang mempunyai kekuasaan ataupun dampak dalam lingkungan politik, seperti pejabat pemerintah, politisi, lembaga negara, maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses pengambilan kebijakan publik. Faccio (2006) menerangkan bahwa suatu entitas dapat dikategorikan mempunyai koneksi politik bila *shareholders* pengendali ataupun manajemen puncaknya memiliki hubungan dengan parlemen, pemerintah, atau aktor politik. Koneksi tersebut dapat muncul melalui kepemilikan saham pemerintah, keterlibatan pejabat atau mantan pejabat dalam struktur dewan direksi dan dewan komisaris, maupun hubungan personal antara pemilik perusahaan dan pihak politik.

Dalam kerangka *agency theory*, koneksi politik yang dimiliki manajemen berpotensi menjadi sumber konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa agen cenderung bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, dan kondisi ini diperparah oleh asimetri informasi yang memberi ruang bagi manajemen untuk memanfaatkan koneksi politiknya dalam merancang strategi perpajakan yang belum tentu selaras dengan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan. Koneksi politik itu sendiri terbukti memiliki nilai ekonomi yang nyata bagi perusahaan. Fisman (2001) menunjukkan hal ini khususnya di negara dengan tingkat intervensi pemerintah

yang tinggi, sementara Claessens et al. (2008) menemukan bahwa koneksi politik memberikan akses preferensial terhadap sumber pendanaan, dan Goldman et al. (2009) membuktikan bahwa kehadiran individu berkoneksi politik dalam dewan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, dalam perspektif *agency theory*, koneksi politik berpotensi menjadi instrumen yang dimanfaatkan manajemen untuk menekan beban pajak melalui kedekatan dengan otoritas regulasi, akses informasi kebijakan yang lebih luas, serta posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan eksternal.

Temuan studi Firmansyah et al. (2022) memperlihatkan bahwa koneksi politik menimbulkan dampak positif pada penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa makin kuat hubungan politik yang dimiliki perusahaan, makin besar pula peluang dalam memanfaatkan koneksi tersebut dalam mengelola beban pajaknya. Pada sektor infrastruktur, keterlibatan perusahaan dengan pemerintah cenderung lebih intens karena sektor ini berkaitan langsung dengan proyek, regulasi, dan kebijakan publik. Oleh sebab itu, perusahaan infrastruktur yang mempunyai koneksi politik diduga memiliki peluang lebih besar dalam memanfaatkan hubungan tersebut dalam upaya menekan beban pajak. Berlandaskan pada uraian tersebut, hipotesis yang diajukan ialah:

H3: Koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

2.3.4 Hubungan antara Ketidakpastian Ekonomi dengan Penghindaran Pajak

Ketidakpastian ekonomi ialah keadaan saat entitas menghadapi kesukaran dalam memprediksi perubahan lingkungan ekonomi. Bloom (2014) menjelaskan bahwa ketidakpastian mencerminkan keterbatasan konsumen, manajer, dan pembuat kebijakan dalam memperkirakan kemungkinan kondisi ekonomi pada masa depan. Ketidakpastian tersebut juga dapat berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Baker dkk. (2016) melalui konsep *economic policy uncertainty*. Dalam perusahaan, ketidakpastian ekonomi dapat muncul melalui perubahan kebijakan fiskal, fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi, perubahan suku bunga, penurunan permintaan, maupun gangguan ekonomi global.

Dalam perspektif teori keagenan, relasi antara *shareholders* sebagai prinsipal serta manajemen sebagai agen berpotensi mengakibatkan *conflict interest* akibat adanya perbedaan tujuan dan asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Ketika kondisi ekonomi tidak stabil, ketidakpastian dapat memperbesar ruang diskresi manajemen dalam mengambil keputusan keuangan. Manajemen sebagai agen dapat menggunakan alasan efisiensi, perlindungan likuiditas, dan kebutuhan menjaga arus kas untuk mengambil kebijakan yang lebih agresif dalam menekan beban perusahaan, termasuk beban pajak.

Nguyen dan Nguyen (2020) menemukan bahwa meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi mendorong perusahaan untuk menurunkan *cash effective tax rate* serta melaksanakan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif. Athira dan Ramesh (2024) juga meneliti hubungan antara ketidakpastian kebijakan ekonomi dan penghindaran pajak dalam konteks internasional. Temuan penelitian

tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Sebagai negara berkembang, tekanan ekonomi yang tidak menentu di Indonesia berpotensi memicu manajemen agar lebih waspada dalam menjaga arus kas, termasuk melalui pengelolaan beban pajak. Berlandaskan pada uraian tersebut, hipotesis yang diajukan ialah:

H4: Ketidakpastian ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.